

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan sebelum dipindah ke Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Kota ini dikenal sebagai salah satu kota terbesar di Pulau Kalimantan bagian selatan dan menjadi pusat aktivitas masyarakat dari berbagai daerah di sekitarnya. Selain itu, Kota Banjarmasin juga memiliki peranan strategis dalam perkembangan ekonomi daerah karena menjadi pusat distribusi barang dan jasa di Kalimantan Selatan.

Secara geografis, Kota Banjarmasin terletak di koordinat sekitar 3°16'46" sampai dengan 3°22'54" Lintang Selatan dan 114°31'40" sampai dengan 114°39'55" Bujur Timur. Kota ini memiliki luas wilayah 98,46 km², dengan jumlah penduduk 683.091 jiwa. Wilayah Kota Banjarmasin secara administratif terbagi menjadi lima kecamatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara. Setiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan menjadi bagian dari sistem pemerintahan kota.

Berdasarkan batas-batas administratifnya, Kota Banjarmasin berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala di sebelah utara dan barat, serta Kabupaten Banjar di sebelah selatan dan timur. Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan Kota Banjarmasin sebagai jalur penghubung antarwilayah serta mendukung perkembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan di daerah sekitarnya.

Kota Banjarmasin dikenal dengan julukan “Kota Seribu Sungai”. Julukan ini muncul karena banyaknya sungai yang mengalir dan membelah wilayah kota, di antaranya Sungai Barito, Sungai Martapura, serta berbagai anak sungai lainnya. Sungai-sungai tersebut memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai sarana transportasi tradisional, sumber mata pencaharian, maupun sebagai bagian dari budaya masyarakat setempat. Salah satu aktivitas yang terkenal adalah pasar terapung yang menjadi daya tarik wisata sekaligus mencerminkan kehidupan masyarakat yang sangat dekat dengan sungai.

Dari segi topografi, wilayah Kota Banjarmasin sebagian besar merupakan dataran rendah dengan kondisi tanah rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ketinggian wilayahnya relatif rendah, bahkan beberapa bagian berada di bawah permukaan laut. Kondisi tersebut menyebabkan Kota Banjarmasin memiliki sistem drainase dan pengelolaan air yang khas untuk mengatasi genangan air, terutama pada musim hujan atau saat terjadi pasang air sungai.

Secara demografis, Kota Banjarmasin memiliki jumlah penduduk

yang cukup besar dengan tingkat kepadatan yang tinggi dibandingkan wilayah lain di Kalimantan Selatan. Penduduk Kota Banjarmasin terdiri dari berbagai suku dan latar belakang budaya, namun mayoritas merupakan suku Banjar yang memiliki budaya dan tradisi yang kuat. Selain itu, terdapat pula masyarakat dari suku Jawa, Bugis, Madura, dan suku lainnya yang hidup berdampingan dalam kehidupan sosial masyarakat kota.

Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, Kota Banjarmasin memiliki berbagai fasilitas penunjang seperti lembaga pendidikan, pusat perdagangan, perkantoran, fasilitas kesehatan, serta sarana transportasi yang cukup lengkap. Aktivitas perdagangan di kota ini sangat berkembang, baik melalui pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan modern.

Dengan berbagai potensi yang dimiliki, baik dari segi geografis, sosial, ekonomi, maupun budaya, Kota Banjarmasin menjadi lokasi yang relevan untuk dijadikan tempat penelitian. Kondisi tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai karakteristik wilayah dan masyarakat yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian serta memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

a. Data Ketimpangan Pendapatan di Kota Banjarmasin Tahun 2017-2024

Data untuk penelitian ini diperoleh dari berbagai publikasi

Badan Pusat Statistik (BPS), yang diakses melalui situs web resminya. Rincian angka ketimpangan pendapatan selama 8 tahun tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 4. 1 Ketimpangan Pendapatan di Kota Banjarmasin periode 2017-2024

Tahun	Ketimpangan Pendapatan (%)
2017	0,33
2018	0,38
2019	0,33
2020	0,34
2021	0,35
2022	0,33
2023	0,37
2024	0,35

Sumber: Badan Pusat Statistik Ketimpangan Pendapatan Kota Banjarmasin 2017-2024

Dari tabel yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi adanya tren dalam ketimpangan pendapatan Kota Banjarmasin pada rentang waktu 2017 hingga 2024. Visualisasi ini disajikan untuk menggambarkan tren tersebut secara lebih jelas sebagai berikut:

Grafik 4. 1 Ketimpangan Pendapatan di Kota Banjarmasin periode 2017-2024



Sumber: Grafik diolah 2026

Grafik ketimpangan pendapatan di Banjarmasin tahun 2017–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Nilai ketimpangan meningkat

dari 0,33 pada 2017 menjadi 0,38 pada 2018, kemudian turun menjadi 0,33 pada 2019. Selanjutnya ketimpangan kembali meningkat pada 2020–2021, menurun pada 2022, meningkat lagi pada 2023, dan sedikit menurun pada 2024 menjadi 0,35. Secara umum, tingkat ketimpangan berada pada kisaran 0,33-0,38 yang menunjukkan ketimpangan pada tingkat sedang. Fluktuasi ketimpangan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perbedaan tingkat pendapatan antar kelompok masyarakat, kesempatan kerja yang tidak merata, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta perkembangan sektor ekonomi di wilayah perkotaan. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan pembangunan juga dapat memengaruhi distribusi pendapatan masyarakat.

b. Data Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banjarmasin Tahun 2017-2024

Bagian ini menyajikan data laju pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin dalam rentang waktu 2017–2024. Data yang digunakan adalah hasil dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan didapatkan di situs resminya. Rangkuman perkembangan selama 8 tahun tersebut ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banjarmasin periode 2017-2024

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2017	6,40
2018	6,38
2019	6,09
2020	-1,88
2021	3,41
2022	5,69

2023	5,62
2024	5,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarmasin 2017-2024

Berdasarkan tabel yang telah ditampilkan oleh penulis diatas, pertumbuhan ekonomi di Banjarmasin pada periode 2017 sampai 2024. Menggambarkan dinamika pertumbuhan yang mengalami tren dari tahun ke tahun. Adapun tren laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2017–2024 dapat dilihat dengan lebih jelas pada grafik berikut:

Grafik 4. 2 Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banjarmasin periode 2017-2024



Sumber: Grafik diolah 2026

Pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin menunjukkan tren yang berfluktuasi antar tahun, sebagaimana tergambar pada grafik. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan angka 6,40%, sedangkan tahun 2020 menunjukkan angka pertumbuhan terendah sebesar -1,88%. Penyebab dari penurunan tersebut sedikit banyaknya juga dipengaruhi oleh wabah penyakit Covid-19 yang melanda Indonesia pada saat itu. Salah satu faktor penyebab pertumbuhan ekonomi yang menjadikan hal tersebut menurun ialah

ketidaksejahteraan masyarakat saat menghadapi peristiwa tersebut.

c. Data Persentase Penduduk Miskin di Kota Banjarmasin Tahun 2017-2024

Tabel berikut menyajikan data tentang persentase penduduk miskin selama periode delapan tahun, yang diperoleh dari sumber resmi di Badan Pusat Statistik (BPS) melalui situs web resminya, untuk mendukung analisis dalam penelitian ini:

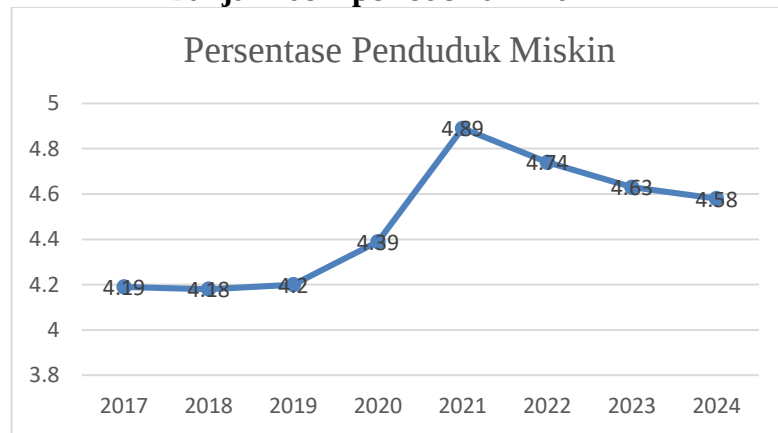
Tabel 4. 3 Persentase Penduduk Miskin di Kota Banjarmasin periode 2017-2024

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)
2017	4,19
2018	4,18
2019	4,20
2020	4,39
2021	4,89
2022	4,74
2023	4,63
2024	4,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Persentase Penduduk Miskin Kota Banjarmasin 2017-2024

Pengamatan terhadap data dalam tabel menunjukkan peningkatan dinamis persentase penduduk miskin di Kota Banjarmasin antara tahun 2017 dan 2024. Untuk memperjelas pola perkembangan tersebut, berikut disajikan visualisasi tren.

Grafik 4. 3 Persentase Penduduk Miskin di Kota Banjarmasin periode 2017-2024



Sumber: Grafik diolah 2026

Grafik persentase penduduk miskin di Banjarmasin tahun 2017–2024 menunjukkan tren yang sempat meningkat kemudian menurun. Pada periode 2017–2019 persentase penduduk miskin relatif stabil di kisaran 4,18–4,20%. Selanjutnya angka kemiskinan mulai meningkat pada 2020 menjadi 4,39% dan mencapai puncaknya pada 2021 sebesar 4,89%. Setelah itu, tingkat kemiskinan secara bertahap menurun menjadi 4,74% pada 2022, 4,63% pada 2023, dan 4,58% pada 2024. Peningkatan kemiskinan pada 2020–2021 kemungkinan dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi, berkurangnya kesempatan kerja, serta penurunan pendapatan masyarakat. Sementara itu, penurunan angka kemiskinan setelah 2021 dapat disebabkan oleh pemulihan aktivitas ekonomi, meningkatnya kesempatan kerja, serta adanya program bantuan sosial dan kebijakan pemerintah yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Data Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Banjarmasin Tahun 2017-2024

Peneliti pada bagian ini menampilkan data tingkat pengangguran terbuka di Kota Banjarmasin dari tahun 2017 sampai 2024. Data untuk penelitian ini berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang diakses melalui situs web resminya. Rincian tingkat pengangguran terbuka selama periode delapan tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

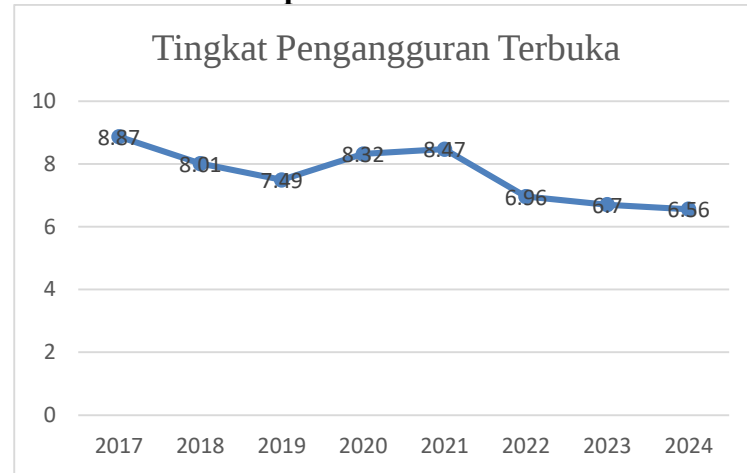
Tabel 4. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Banjarmasin periode 2017-2024

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2017	8,87
2018	8,01
2019	7,49
2020	8,32
2021	8,47
2022	6,96
2023	6,70
2024	6,56

Sumber: Badan Pusat Statistik Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banjarmasin 2017-2024

Dari tabel diatas dapat diidentifikasi adanya tren pada tingkat pengangguran terbuka di Kota Banjarmasin dalam rentang waktu 2017 hingga 2024. Visualisasi ini ditampilkan guna menggambarkan tren tersebut, adapun tren tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2017–2024 dapat dilihat dengan lebih jelas pada grafik berikut:

Grafik 4.4
Persentase Penduduk Miskin di Kota Banjarmasin
periode 2017-2024



Sumber: Grafik diolah 2026

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Banjarmasin tahun 2017–2024 menunjukkan tren yang cenderung menurun meskipun sempat meningkat di beberapa tahun. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran sebesar 8,87%, kemudian menurun menjadi 8,01% pada 2018 dan 7,49% pada 2019. Namun pada periode 2020–2021 terjadi peningkatan kembali menjadi 8,32% dan 8,47%. Setelah itu, tingkat pengangguran mengalami penurunan cukup signifikan pada 2022 menjadi 6,96%, lalu terus menurun menjadi 6,70% pada 2023 dan 6,56% pada 2024. Peningkatan pengangguran pada 2020–2021 kemungkinan dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas ekonomi, berkurangnya kesempatan kerja, serta penyesuaian tenaga kerja di berbagai sektor usaha. Sementara itu, penurunan tingkat pengangguran setelah 2021 dapat disebabkan oleh pemulihan ekonomi, meningkatnya kegiatan usaha dan investasi, serta bertambahnya

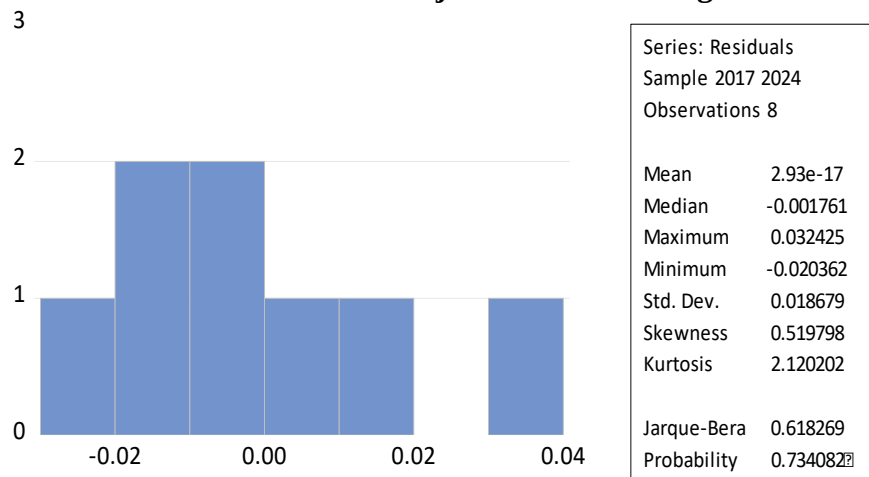
peluang kerja bagi masyarakat.

3. Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Dalam analisis regresi, uji normalitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah residual mengikuti distribusi normal. Asumsi normalitas residual penting karena validitas uji statistik, seperti uji t dan uji F, sangat bergantung pada terpenuhinya asumsi ini (Warongan et al., 2022). Normalitas data dapat ditentukan berdasarkan dua indikator. Data dianggap terdistribusi normal jika nilai Jarque-Bera (J-B) kurang dari atau sama dengan nilai Chi-Square dalam tabel dan memiliki nilai probabilitas 0,05 atau lebih besar pada tingkat signifikansi yang digunakan. Sebaliknya, data dianggap tidak terdistribusi normal jika nilai Jarque-Bera (J-B) lebih besar dari atau sama dengan nilai Chi-Square dalam tabel dan nilai probabilitas kurang dari atau sama dengan 0,05, sehingga gagal memenuhi kriteria signifikansi yang ditetapkan.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas Histogram

Sumber: Hasil output evIEWS uji normalitas

Berdasarkan hasil uji Jarque-Bera pada tabel, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,734082. Nilai ini lebih tinggi dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05 ($0,734082 > 0,05$). Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa data penelitian telah memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian, data yang digunakan dalam analisis memiliki distribusi yang mendekati atau mengikuti distribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dalam model regresi dilakukan dengan memeriksa nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari setiap variabel independen. VIF digunakan untuk menentukan tingkat hubungan atau korelasi antara suatu variabel independen dengan variabel independen lainnya dalam model. Jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka variabel tersebut menunjukkan multikolinearitas tinggi, yang mengindikasikan hubungan yang

kuat antara variabel independen dan dapat menyebabkan pelanggaran asumsi regresi klasik. Kondisi ini berpotensi membuat estimasi koefisien regresi kurang stabil dan mengurangi akurasi interpretasi hasil analisis. Sebaliknya, jika nilai VIF 10 atau lebih rendah, model dianggap tidak memiliki masalah multikolinearitas, sehingga hasil estimasi regresi dapat dipercaya dan diinterpretasikan dengan lebih baik.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolineritas

Variabel	VIF
C	NA
Pertumbuhan Ekonomi	1,227042
P0	1,241335
TPT	1,354597

Sumber: Hasil output eviws uji multikolinieritas

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan E-Views, nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk variabel independen Pertumbuhan Ekonomi (X1) tercatat sebesar 1,227042, Persentase Penduduk Miskin (X2) sebesar 1,241335 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (X3) 1,354597. Nilai tersebut menyimpulkan bahwa masing-masing variabel memiliki korelasi yang rendah terhadap variabel independen lainnya. Hal ini sesuai dengan batasan umum bahwa nilai VIF di bawah 10 dan di atas 1 menunjukkan tidak terdapatnya permasalahan multikolinearitas dalam model regresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

asumsi bebas multikolinearitas telah terpenuhi, dan data yang digunakan tidak mengindikasikan adanya gejala multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji Breusch–Pagan dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan apakah model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas, yaitu kondisi di mana varians residual atau kesalahan tetap konstan di seluruh observasi. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka terjadi heteroskedastisitas, yang dapat mengurangi efisiensi estimasi menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS). Pengambilan keputusan dalam uji ini dilakukan pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas (p-value) dengan batas signifikansi yang telah ditentukan. Berdasarkan kriteria pengujian heteroskedastisitas, nilai signifikansi (p-value) lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga asumsi homoskedastisitas dapat diterima, dan sebaliknya jika kurang dari 0,05 menunjukkan adanya heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: Breusch Pagan-Godfrey

F-statistic	0,817113	Prob. F(3,4)	0,5479
Obs*R-squared	3,039789	Prob. Chi-Square(3)	0,3855

Sumber: Hasil output eviws uji heteroskedastisitas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa probabilitas Chi-

Square(3) dalam statistik Obs*R-Squared adalah 0,3855. Karena nilai probabilitas ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan, tidak ada bukti heteroskedastisitas. Oleh karena itu, residual model mempunyai varians konstan dan model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi homoskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji Korelasi Serial LM. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai Prob. Chi-Square (2). Jika nilainya lebih besar dari 0,05, maka data tidak terautokorelasi, sehingga model regresi memenuhi asumsi bahwa kesalahan prediksi (residual) tidak saling berhubungan. Sebaliknya, jika nilainya kurang dari 0,05, maka data terautokorelasi.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	1,963110	Prob. F(2,2)	0,4506
Obs*R-squared	5,579032	Prob. Chi-Square(2)	0,0615

Sumber: Hasil output evIEWS uji autokorelasi

Berdasarkan hasil pada tabel, nilai probabilitas Chi-Square(2) untuk statistik Obs*R-Squared adalah 0,0615. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi menunjukkan tidak terdapat gejala autokorelasi.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen: Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin, dan Tingkat Pengangguran Terbuka, serta satu variabel dependen: Ketidaksetaraan Pendapatan. Untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dan mengidentifikasi hubungan antar variabel tersebut, digunakan metode regresi linier berganda. Hubungan antar variabel dalam penelitian ini diungkapkan melalui model yang dirumuskan dalam beberapa persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Tabel 4. 9 Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Coefficient	Prob.
C	0,377885	0,1819
Pertumbuhan Ekonomi	0,000563	0,8858
P0	-0,001145	0,9773
TPT	-0,003635	0,7850

Sumber: Hasil output eviews uji estimasi regresi berganda

Berdasarkan model persamaan, dihasilkan dalam penelitian ini:

$$Y = 0,377885 + 0,000563(X_1) - 0,001145(X_2) - 0,003635(X_3) + e$$

Komponen-komponen yang terkandung dalam persamaan ini dapat dijelaskan dan dipahami melalui uraian berikut:

- 1) Konstanta sebesar 0,377885 menunjukkan bahwa tanpa pengaruh variabel independen, ketidaksetaraan pendapatan berada pada nilai 0,377885.
- 2) β_1 sebesar 0,000563 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan menyebabkan ketidaksetaraan pendapatan meningkat sebesar 0,000563%, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi menurun sebesar 1%, ketidaksetaraan pendapatan juga akan menurun sebesar 0,000563%, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap tidak berubah.
- 3) β_2 sebesar -0,001145 menunjukkan hubungan negatif antara persentase penduduk miskin dan ketidaksetaraan pendapatan. Ini berarti bahwa peningkatan 1% dalam persentase penduduk miskin diperkirakan akan mengurangi ketidaksetaraan pendapatan sebesar 0,001145%, sedangkan penurunan 1% dalam persentase penduduk miskin diperkirakan akan meningkatkan ketidaksetaraan pendapatan sebesar 0,001145%, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap konstan.
- 4) β_3 sebesar -0,003635 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% pada tingkat pengangguran terbuka akan menyebabkan ketidaksetaraan pendapatan menurun sebesar 0,003635%, dengan asumsi variabel lain tetap konstan (*ceteris paribus*). Sebaliknya, setiap penurunan 1% pada tingkat pengangguran terbuka akan

diikuti oleh peningkatan ketidaksetaraan pendapatan sebesar 0,003635%.

c. Koefisien Determinasi (R-square)

Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0,042256
-----------	----------

Sumber: Hasil output evIEWS uji Koefisien Determinasi

Nilai R-Squared sebesar 0,042256 menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama dapat menjelaskan ketidaksetaraan pendapatan sebesar 4,23%, sedangkan sisanya sebesar 95,77% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

d. Uji Hipotesis

1) Uji Simultan (Uji F)

Uji F dalam analisis regresi linier berganda digunakan untuk menentukan apakah semua variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini dapat dilihat melalui nilai probabilitas statistik F (Prob. F-Statistic). Dasar dari keputusan ini adalah sebagai berikut:

- a) Jika $F\text{-statistik} > F\text{-tabel}$ dan nilai $\text{Prob}(F\text{-Statistic}) < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan adanya pengaruh variabel independen terhadap dependen.

- b) Jika $F\text{-statistik} < F\text{-tabel}$ dan nilai $\text{Prob}(F\text{-statistic}) > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini menunjukkan tidak adanya pengaruh variabel independen terhadap dependen.

Tabel 4. 11 Hasil Uji F (Simultan)

F-statistic	0,058827
Prob(F-statistic)	0,978835

Sumber: Hasil output evIEWS uji Uji F (Simultan)

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan EVIEWS 12, nilai statistik F (F hitung) diperoleh sebesar 0,058. Sementara itu, nilai F tabel pada tingkat signifikansi (α) 0,05 dengan derajat kebebasan $df_1 = 3$ dan $df_2 = 4$ ($n - k - 1 = 8 - 3 - 1 = 4$) adalah 6,59. Karena nilai F hitung lebih kecil dari F tabel ($0,058 < 6,59$), dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2) Uji Parsial (Uji T)

Untuk menentukan sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen, ahli statistik menggunakan uji-T. Batas signifikansi uji ditetapkan pada 5% (0,05). Untuk membuat keputusan:

- a) Jika nilai $t\text{-statistik} > t\text{-tabel}$ dan nilai probabilitas $< 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak, sedangkan hipotesis alternatif (H_a) diterima, yang artinya memiliki pengaruh.

- b) Jika nilai t -statistik $< t$ -tabel dan nilai probabilitas $> 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) diterima, sedangkan hipotesis alternatif (H_a) ditolak, yang artinya tidak memiliki pengaruh.

Tabel 4. 12 Hasil Uji T (Parsial)

Variabel	t-Statistic	Prob.
C	1,613735	0,1819
Pertumbuhan Ekonomi	0,152949	0,8858
P0	-0,030242	0,9773
TPT	-0,291734	0,7850

Sumber: Hasil output eviws uji Uji T (Parsial)

Uji t digunakan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual (parsial), dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_1)

Berdasarkan hasil uji t , nilai t yang dihitung untuk variabel pertumbuhan ekonomi adalah 0,152949, sedangkan nilai t -tabel pada derajat kebebasan (df) = 4 ($n-k-1 = 8-3-1 = 4$) dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ adalah 2,131. Karena nilai t -statistik $< t$ -tabel ($0,152949 < 2,131$), maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Selain itu, nilai probabilitas 0,8858 $>$ tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan

terhadap ketimpangan pendapatan.

b) Variabel Persentase Penduduk Miskin (X2)

Berdasarkan hasil uji t, nilai t yang dihitung untuk variabel persentase penduduk miskin adalah -0,030242, sedangkan nilai t-tabel pada derajat kebebasan (df) = 4 ($n-k-1 = 8-3-1 = 4$) dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ adalah 2,131. Karena nilai t-statistik < t-tabel ($-0,030242 < 2,131$), maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Selain itu, nilai probabilitas 0,9773 > tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial persentase penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

c) Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (X3)

Berdasarkan hasil uji t, nilai t yang dihitung untuk variabel tingkat pengangguran terbuka adalah -0,291734, sedangkan nilai t-tabel pada derajat kebebasan (df) = 4 ($n-k-1 = 8-3-1 = 4$) dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ adalah 2,131. Karena nilai t-statistik < t-tabel ($-0,291734 < 2,131$), maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Selain itu, nilai probabilitas 0,7850 > tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin (P0), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Banjarmasin secara Simultan

Dengan menggunakan pengujian hipotesis, peneliti menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Kota Banjarmasin. Dengan tingkat signifikansi 0,978835, yang lebih besar dari kriteria 0,05. Nilai F-statistic sebesar 0,058827 lebih kecil dari nilai F-tabel sebesar 6,591. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga faktor independen tersebut tidak berdampak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada saat yang sama, sehingga menerima hipotesis nol (H_0) dan menolak hipotesis alternatif (H_a).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka umumnya dipandang sebagai faktor yang mendorong peningkatan ketimpangan pendapatan. Namun, di Kota Banjarmasin, ketiga variabel tersebut tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai signifikansi yang tinggi tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan yang cukup kuat secara statistik antara variabel independen (pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka) dengan variabel

dependen (ketimpangan pendapatan) pada tingkat kepercayaan 3%. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0), yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara ketiga variabel bebas terhadap ketimpangan pendapatan, diterima. Sebaliknya, hipotesis alternatif (H_1), yang menyatakan adanya pengaruh, ditolak.

Temuan ini mengisyaratkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka secara teoritis sering dianggap sebagai faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan, namun dalam periode penelitian yang dimaksud ketiga variabel tersebut belum menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik, baik secara parsial (uji T) maupun simultan (uji F), terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa dinamika ketimpangan pendapatan di wilayah penelitian tidak secara langsung dipengaruhi oleh variasi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, maupun tingkat pengangguran terbuka. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan (Prayoga, 2025) yang menemukan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan positif yang relatif stabil setiap tahunnya, dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan tidak selalu bersifat langsung. Hal ini disebabkan karena manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak selalu terdistribusi secara merata di seluruh lapisan masyarakat, sehingga peningkatan output ekonomi lebih banyak dinikmati oleh

kelompok tertentu. Selain itu, efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan ketimpangan sangat bergantung pada struktur ekonomi, kebijakan distribusi pendapatan, serta akses masyarakat terhadap peluang ekonomi yang produktif. Untuk variabel independen selanjutnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan tidak selalu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan dalam penelitian mengindikasikan bahwa variabel persentase penduduk miskin tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga perubahan tingkat kemiskinan tidak secara langsung menyebabkan perubahan pada tingkat ketimpangan. Hal ini disebabkan karena ketimpangan pendapatan lebih dipengaruhi oleh distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin itu sendiri. Serta peningkatan atau penurunan kemiskinan belum tentu diikuti oleh perubahan tingkat pendapatan secara merata, serta adanya faktor lain seperti struktur ekonomi, kesempatan kerja, dan kebijakan distribusi yang lebih dominan dalam memengaruhi ketimpangan pendapatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kemiskinan tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, melainkan dapat bersifat tidak langsung atau dipengaruhi oleh variabel lain (Permana, 2016). Selain itu, (Rohmah et al., 2025) menunjukkan temuan dalam penelitiannya mengindikasikan bahwa variabel tingkat

pengangguran terbuka tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga peningkatan pengangguran tidak secara langsung mendorong ketimpangan pendapatan di dalam penelitiannya. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan tingkat pengangguran tidak secara langsung memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan dalam wilayah dan periode penelitian tersebut. Kondisi ini terjadi karena tingkat pengangguran tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, meskipun tingkat pengangguran menurun, pekerjaan yang tercipta belum tentu memberikan pendapatan yang merata atau layak, sehingga kesenjangan pendapatan tetap terjadi. Selain itu, adanya dominasi sektor informal dengan tingkat upah yang rendah juga dapat menyebabkan pengangguran yang menurun tidak diikuti dengan perbaikan distribusi pendapatan. Di sisi lain, ketimpangan pendapatan juga dapat lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti perbedaan tingkat pendidikan, akses terhadap peluang kerja, serta struktur ekonomi yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu. Dengan demikian, perubahan pada tingkat pengangguran tidak secara otomatis berdampak pada penurunan ketimpangan pendapatan, melainkan bergantung pada kualitas pekerjaan yang tersedia dan pemerataan akses ekonomi di masyarakat.

Dalam teori pembangunan ekonomi dual sektor yang dikemukakan oleh Arthur Lewis (1954), pertumbuhan ekonomi ditopang

oleh proses transformasi struktural melalui perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional yang berproduktivitas rendah ke sektor modern yang lebih produktif dan mampu melakukan akumulasi modal. Proses ini diharapkan dapat meningkatkan output nasional sekaligus memperluas kesempatan kerja sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata (Lewis, 1954). Namun, kondisi di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa mekanisme yang dijelaskan dalam teori Lewis belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya penyerapan tenaga kerja di sektor modern, sehingga sebagian besar tenaga kerja tetap berada pada sektor dengan produktivitas rendah. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran secara signifikan serta belum memberikan dampak nyata terhadap pemerataan pendapatan. Dengan demikian, variabel pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka sebagai faktor utama dalam proses pembangunan belum sepenuhnya berkontribusi dalam menekan ketimpangan pendapatan di Kota Banjarmasin.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Banjarmasin secara Parsial

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel Pertumbuhan Ekonomi, diperoleh nilai t-statistik sebesar 0,152949 yang lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 2,131. Selanjutnya, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05, nilai probabilitas yang dihasilkan lebih besar yaitu sebesar 0,8858.

Hal ini menunjukkan bahwa H_{a1} ditolak dan H_{o1} diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kota Banjarmasin. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan tidak dapat diterima.

Tidak signifikannya pengaruh tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Banjarmasin belum mampu memengaruhi distribusi pendapatan secara nyata. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan hasil pembangunan, sehingga tidak memberikan dampak langsung terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di masyarakat.

Kondisi ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cenderung tidak merata dan hanya terpusat pada sektor-sektor tertentu yang memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), namun tidak melibatkan sebagian besar tenaga kerja. Selain itu, dominasi sektor informal dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Faktor lain seperti ketimpangan akses terhadap pendidikan, keterampilan, dan peluang usaha juga dapat menjadi penyebab tidak meratanya distribusi

pendapatan meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori Kuznets yang menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan sebelum akhirnya menurun seiring dengan kematangan ekonomi. Namun demikian, hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan tidak selalu berlaku secara *universal*, terutama pada konteks daerah dengan karakteristik ekonomi tertentu seperti Kota Banjarmasin. Studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yoertiara, 2022) yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak selalu memberikan dampak yang signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Hal ini memperkuat bahwa faktor-faktor lain di luar pertumbuhan ekonomi memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan tingkat ketimpangan pendapatan.

3. Pengaruh Persentase Penduduk Miskin (P0) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Banjarmasin secara Parsial

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel Persentase Penduduk Miskin, diperoleh nilai t-statistik sebesar -0,030242 yang lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 2,131. Selanjutnya, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05, nilai probabilitas yang dihasilkan lebih besar yaitu sebesar 0,9773. Hal ini menunjukkan bahwa H_{a2} ditolak dan H_{02} diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tidak berpengaruh

signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kota Banjarmasin. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan tidak dapat diterima. Tidak adanya pengaruh yang signifikan ini menunjukkan bahwa perubahan tingkat kemiskinan tidak secara langsung memengaruhi distribusi pendapatan di masyarakat. Artinya, meskipun terjadi penurunan atau peningkatan jumlah penduduk miskin, hal tersebut belum tentu berdampak pada tingkat ketimpangan pendapatan secara keseluruhan.

Kondisi ini dapat disebabkan oleh fakta bahwa ketimpangan pendapatan tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah penduduk miskin, tetapi lebih ditentukan oleh perbedaan pendapatan antar kelompok masyarakat secara keseluruhan, termasuk kelompok menengah dan atas. Selain itu, adanya program bantuan sosial dan intervensi pemerintah juga dapat mengurangi dampak langsung kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan. Faktor lain seperti ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesempatan kerja juga dapat lebih dominan dalam memengaruhi distribusi pendapatan dibandingkan dengan tingkat kemiskinan itu sendiri.

Hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan teori yg dikemukakan oleh Kuncoro (1997), bahwa keterkaitan antara tingkat kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan tidak dapat dipisahkan. Dari

sisi ekonomi secara makro kemiskinan muncul akibat dari ketidakseimbangan pola kepemilikan sumber daya, atau dapat terjadi karna tidak meratanya pembangunan di suatu wilayah, sehingga menimbulkan terjadinya disparitas pendapatan (kuncoro dalam Octavia, 2021). Namun demikian, dalam konteks penelitian ini, kemiskinan tidak menjadi faktor utama yang menentukan ketimpangan pendapatan di Kota Banjarmasin. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Octavia, 2021) yang menemukan bahwa kemiskinan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, terutama ketika terdapat faktor-faktor lain yang lebih dominan seperti struktur ekonomi dan distribusi kesempatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan fenomena yang kompleks dan tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel saja.

4. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Banjarmasin secara Parsial

Berdasarkan hasil uji hipotesis terhadap uji t yang diperoleh dan nilai t-tabel untuk variabel tingkat pengangguran terbuka, diketahui bahwa nilai t-statistik sebesar -0,291734, sedangkan nilai t-tabel adalah 2,131. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai t-statistik lebih rendah daripada nilai t tabel ($-0,291734 < 2,131$). Selain itu, nilai probabilitas sebesar 0,7850 melebihi tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($0,7850 > 0,05$). Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kota Banjarmasin. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan tidak dapat diterima. Tidak signifikannya pengaruh ini mengindikasikan bahwa perubahan tingkat pengangguran tidak secara langsung berdampak pada distribusi pendapatan di masyarakat. Dengan demikian, tingkat pengangguran tidak dapat dijadikan sebagai indikator utama dalam menjelaskan ketimpangan pendapatan di Kota Banjarmasin.

Kondisi ini disebabkan oleh adanya sektor informal yang cukup besar dan mampu menyerap tenaga kerja, meskipun dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah. Hal ini menyebabkan individu yang tidak bekerja di sektor formal tetap memiliki sumber pendapatan, sehingga pengangguran tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, kualitas pekerjaan juga menjadi faktor penting, dimana pekerjaan yang tersedia belum tentu memberikan pendapatan yang merata antar individu. Faktor lain seperti perbedaan tingkat pendidikan, keterampilan, dan akses terhadap pekerjaan yang layak juga turut memengaruhi distribusi pendapatan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori Distribusi Pendapatan (Neoklasik) dari Alfred Marshall, yang menyatakan bahwa pengangguran dapat memperlebar ketimpangan pendapatan karena

individu yang tidak bekerja tidak memperoleh pendapatan. Namun demikian, dalam konteks penelitian ini, pengangguran tidak menjadi faktor yang dominan dalam memengaruhi ketimpangan pendapatan di Kota Banjarmasin. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Ashari et al., 2024) yang menunjukkan bahwa pengangguran tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, terutama pada daerah yang memiliki sektor informal yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang lebih kompleks dibandingkan hanya tingkat pengangguran.